



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L K P j) TAHUN 2022



Dinas Lingkungan Hidup

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini disusun sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPj, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dalam kaitan dengan hal ini, bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022. LKPj Dinas Lingkungan Hidup ini juga merupakan informasi Capaian pelaksanaan Kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LKPj Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang barokah. Aamiiiin.....!

Benteng, Januari 2023
KEPALA DLH,



MUH. TAUFIK KADIR, ST.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP : 19720303 200604 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	1
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural..	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	7
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	24
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	26
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	27
2.1.5. Inovasi.....	32
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	36
2.2. Kebijakan daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	36
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.....	39
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan & Penugasan Yang Dilaksanakan	40
3.2. Hambatan hambatan.....	40
BAB IV : PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 2. Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan	5
Tabel 3. Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat.....	5
Tabel 4. Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 5. Capaian Kinerja Program & Kegiatan DLH tahun 2022	8
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU DLH Tahun 2022.....	25
Tabel 7. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada DLH.....	27
Tabel 8. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yg sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja...	28
Tabel 10. Inovasi	33
Tabel 11. Prestasi dan Penghargaan	36
Tabel 12. Kebijakan Strategis DLH Tahun 2022	37
Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum DLH



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 35, Benteng Selayar, 92812 Sulawesi Selatan. Telepon (0414) 21263, Email: dislhksly@gmail.com. Berada pada titik koordinat 6°07'21.6"S 120°27'33.3"E. Adapun Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tipe B adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretaris
3. 3 (tiga) Bidang
4. 3 (tiga) Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang K

edudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan

Fungsional;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian-subbagian yang berada di dalam sekretariat masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sementara itu, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Seksi-seksi yang ada di dalam tiap bidang, bertanggung jawab secara langsung kepada masing-masing Kepala Bidang.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022 sebanyak 34 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 Orang dan Perempuan Sebanyak 28 Orang dengan Klasifikasi menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 01. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	3	4
STRATA 1	7	13	20
DIPLOMA 4	0	0	0
DIPLOMA 3	0	1	1
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	7	0	7
SLTP	0	0	0
SD	1	0	1
Jumlah	16	18	34

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 01 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- ✓ S2 = 4 Orang
- ✓ S1 = 20 Orang
- ✓ D III = 1 Orang
- ✓ SLTA = 7 Orang
- ✓ SD = 1 Orang

Tabel 02. Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	0	0	0
II	1	0	1
III	1	3	4
IV	4	9	13
Jumlah	6	12	18

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 02 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- ✓ Golongan II = 1 Orang
- ✓ Golongan III = 4 Orang
- ✓ Golongan IV = 13 Orang

Tabel 03. Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat

Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina	1	1	2
Pembina Tk.I	1	0	1
Penata Muda	1	2	3
Penata Muda Tk.I	0	2	2
Penata	4	3	7
Penata Tk.I	2	9	11
Pengatur Muda	0	0	0
Pengatur Muda Tk.I	3	0	3
Pengatur	2	1	3
Pengatur Tk.I	1	0	1
Juru Muda	0	0	0
Juru Muda Tk.I	1	0	0
Jumlah	16	18	34

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 02 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat adalah sebagai berikut:

- ✓ Pembina = 2 Orang
- ✓ Pembina Tk.I = 1 Orang
- ✓ Penata Muda = 3 Orang

- ✓ Penata Muda Tk.I = 2 Orang
- ✓ Penata = 7 Orang
- ✓ Penata Tk.I = 11 orang
- ✓ Pengatur Muda Tk.I = 3 Orang
- ✓ Pengatur = 3 Orang
- ✓ Pengatur Tk.I = 1 Orang
- ✓ Juru Muda Tk.I = 1 Orang

Sedangkan untuk Jumlah Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 04. Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
EselonII/B	1	0	1
EselonIII/A	1	0	1
EselonIII/B	0	3	3
EselonIV/A	3	9	12
Fungsional	0	0	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	1
Analisis Hukum	0	1	1
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	0	1
Pramu Bakti	1	0	1
Bendahara	1	0	1
Pengadministrasi Penerimaan	1	0	1
Pengadministrasi Keuangan	0	1	1
Analisis Lingkungan Hidup	0	2	2
Pengawas Lingkungan Hidup	1	0	1
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	1	1	2
Pengadministrasi Umum	5	0	5
Jumlah	16	18	34

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2022

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja atau disebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjanya untuk seluruh indikator kinerja yang adadiharapkan dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 05. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,03	104,82 166,30%			
					Alokasi Anggaran : Rp7.340.152.885	Realisasi Anggaran: Rp7.157.453.981 97,51%			
				Keg : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp50.382.000	Realisasi Anggaran: Rp41.562.800 82,49%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp19.119.000	Realisasi Anggaran: Rp16.456.300 86,07%			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp3.456.000	Realisasi Anggaran: Rp2.570.200 74,37%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp2.472.000	Realisasi Anggaran: Rp2.265.000 91,63%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp3.510.000	Realisasi Anggaran: Rp2.230.000 64%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Alokasi Anggaran : Rp1.886.000	1 100% Realisasi Anggaran: Rp1.446.000 76,67%			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Alokasi Anggaran : Rp4.850.000	3 100% Realisasi Anggaran: Rp3.286.600 67,77%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Alokasi Anggaran : Rp15.089.000	13 100% Realisasi Anggaran: Rp9.573.500 63,44%			
				Keg : Administasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Alokasi Anggaran : Rp2.884.746.300	100 100% Realisasi Anggaran: Rp2.092.701.642 72,54%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Alokasi Anggaran : Rp2.853.402.000	35 90% Realisasi Anggaran: Rp2.736.465.759			
						96%			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39 Alokasi Anggaran : Rp4.959.000	35 89,74% Realisasi Anggaran: Rp4.718.200 95%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran	12 Alokasi Anggaran : Rp24.485.300	12 100% Realisasi Anggaran: Rp23.125.300 94%			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Alokasi Anggaran : Rp1.900.000	12 100% Realisasi Anggaran: Rp1.871.500 99%			
				Keg : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Alokasi Anggaran : Rp28.180.800	100 100% Realisasi Anggaran: Rp28.180.800 100%			
				Sub Kegiatan :					

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4 100% Alokasi Anggaran : Rp12.990.400 Realisasi Anggaran: Rp12.990.400 100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4 100% Alokasi Anggaran : Rp15.190.400 Realisasi Anggaran: Rp15.190.400			
						100%			
				Keg : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	85,71	100 116,67% Alokasi Anggaran : Rp150.387.000 Realisasi Anggaran: Rp147.632.600			
						98%			
				Sub Kegiatan :					
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2176	2245 103,17% Alokasi Anggaran : Rp147.647.000 Realisasi Anggaran: Rp144.977.000 98%			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12 100%			

					Alokasi Anggaran : Rp2.740.000	Realisasi Anggaran: Rp2.655.600 97%			
				Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Alokasi Anggaran : Rp94.685.000	100 100% Realisasi Anggaran: Rp89.735.000 95%			
				Sub Kegiatan :					
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Alokasi Anggaran : Rp14.449.000	4 100% Realisasi Anggaran: Rp14.449.000 100%			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Alokasi Anggaran : Rp14.985.500	2 100% Realisasi Anggaran: Rp11.765.500 79%			
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Alokasi Anggaran : Rp14.250.500	2 100% Realisasi Anggaran: Rp12.520.500 88%			

				Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	5 100% Alokasi Anggaran : Rp51.000.000	Realisasi Anggaran: Rp51.000.000 100%			
				Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Alokasi Anggaran : Rp220.541.000	Realisasi Anggaran: Rp204.601.244 93%			
				Sub Kegiatan :						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	Alokasi Anggaran : Rp9.000.000	Realisasi Anggaran: Rp9.000.000 100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	Alokasi Anggaran : Rp6.030.000	Realisasi Anggaran: Rp3.325.000 55%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3		3 100%			

					Alokasi Anggaran : Rp7.200.000	Realisasi Anggaran: Rp6.400.000 89%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	440	440 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp3.430.000	Realisasi Anggaran: Rp3.430.000 100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136	339 249,26			
					Alokasi Anggaran : Rp194.881.000	Realisasi Anggaran: Rp182.446.244 94%			
				Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,33	33,33 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp164.079.000	Realisasi Anggaran: Rp163.395.000			
				Sub Kegiatan :		100%			
				Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	2	2 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp59.800.000	Realisasi Anggaran: Rp59.120.000			
						99%			

				Pengadaan Mebel	4	4			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp24.765.000	Realisasi Anggaran: Rp24.765.000 100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp79.514.000	Realisasi Anggaran: Rp79.510.000 100%			
				Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp2.789.921.785	Realisasi Anggaran: Rp2.772.331.428 99%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350	350			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp27.560.800	Realisasi Anggaran: Rp25.415.800			
						92%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp73.642.185	Realisasi Anggaran: Rp66.044.028			
						100%			

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304	304							
						100%							
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:							
					Rp2.688.718.800	Rp2.680.871.800							
					Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,31	16,31						
							100%						
						Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:						
						Rp957.230.000	Rp943.834.350						
							99%						
						Sub Kegiatan :							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	14							
						100%							
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:							
					Rp110.020.000	Rp106.985.720							
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40	40			
										100%			
									Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
									Rp762.750.000	Rp752.793.830			
										99%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	2	2							
						100%							

					Alokasi Anggaran : Rp40.000.000	Realisasi Anggaran: Rp39.875.000 100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp27.550.000	Realisasi Anggaran: Rp27.489.300 100%			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	5 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp16.910.000	Realisasi Anggaran: Rp16.690.500 99%			
				Program Perencanaan Lingkungan	12,50	11,25 90%			
					Alokasi Anggaran : Rp338.639.000	Realisasi Anggaran: Rp337.465.200 100%			
				Keg : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	12,50	11,25 90%			
					Alokasi Anggaran : Rp338.639.000	Realisasi Anggaran: Rp337.465.200 100%			

				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	12,50	11,25			
						90%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp338.639.000	Rp337.465.200			
						100%			
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,59	2,89			
						111,58%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp3.229.421.500	Rp3.155.847.443			
						98%			
				Keg : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10	33,33			
						333,30%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp2.584.105.500	Rp2.573.733.543			
						100%			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	5	16			
						320%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp72.111.500	Rp71.742.956			
						99%			

				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	52	52			
						100%			
					Alokasi Anggaran : Rp2.511.994.000	Realisasi Anggaran: Rp2.501.990.587			
				Keg : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25	100			
						400%			
					Alokasi Anggaran : Rp29.603.000	Realisasi Anggaran: Rp22.671.000			
				Sub Kegiatan :					
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2	8			
						400%			
					Alokasi Anggaran : Rp29.603.000	Realisasi Anggaran: Rp22.671.000			
				Keg : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,047	0,030			
						63,83%			
					Alokasi Anggaran : Rp615.713.000	Realisasi Anggaran: Rp559.442.900			
						91%			

				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	2	1,15 57,50%			
					Alokasi Anggaran : Rp52.898.000	Realisasi Anggaran: Rp44.339.100 84%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	3,72 372%			
					Alokasi Anggaran : Rp220.415.000	Realisasi Anggaran: Rp205.733.000 93%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10	3,35 33,50%			
					Alokasi Anggaran : Rp342.400.000	Realisasi Anggaran: Rp309.370.800 90%			
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,38	1,24 89,85%			
					Alokasi Anggaran : Rp2.361.109.000	Realisasi Anggaran: Rp2.284.267.446 97%			
				Keg : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10	33,33 333,30%			
					Alokasi Anggaran : Rp2.361.109.000	Realisasi Anggaran: Rp2.284.267.446			

					97%			
				Sub Kegiatan :				
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	3	1		
						33,33%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:		
					Rp73.172.000	Rp64.765.000		
						89%		
				Pengelolaan Kebun Raya	5	3,54		
						70,80%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:		
					Rp216.002.000	Rp197.405.601		
						91%		
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20	20		
						100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:		
					Rp1.966.172.600	Rp1.937.659.220		
						99%		
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0,42	0,42		
						100%		
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:		
					Rp32.526.000	Rp14.936.000		
						46%		
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman	5	5		
						100%		

				Hayati	Alokasi Anggaran : Rp73.146.400	Realisasi Anggaran: Rp69.501.625 95%			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 Alokasi Anggaran : Rp47.119.000	130 130% Realisasi Anggaran: Rp46.682.430 99%			
				Keg : Penyimpanan Sementara Limbah B3	9,25	12,02 129,94%			
					Alokasi Anggaran : Rp47.119.000	Realisasi Anggaran: Rp46.682.430 99%			
				Sub Kegiatan :					
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5 Alokasi Anggaran : Rp29.465.000	12 240% Realisasi Anggaran: Rp18.109.000 61%			

				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5	33 660%			
					Alokasi Anggaran : Rp17.654.000	Realisasi Anggaran: Rp17.217.430 98%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64,00 Alokasi Anggaran : Rp132.995.800	60 93,75% Realisasi Anggaran: Rp129.897.364 98%			
				Keg : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,33 Alokasi Anggaran : Rp132.995.800	1,34 100,75% Realisasi Anggaran: Rp129.897.364 98%			
				Sub Kegiatan :					
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	141 Alokasi Anggaran : Rp30.070.400	142 100,70% Realisasi Anggaran: Rp29.380.400			
						98%			

				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Alokasi Anggaran : Rp63.415.400	45 Realisasi Anggaran: Rp62.235.400 98%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Alokasi Anggaran : Rp39.510.000	2 200% Realisasi Anggaran: Rp38.281.564 97%			
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1,14 Alokasi Anggaran : Rp29.844.000	1,43 125,43% Realisasi Anggaran: Rp29.770.000 100%			
				Keg : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,36 Alokasi Anggaran : Rp29.844.000	14,20 125,00% Realisasi Anggaran: Rp29.770.000 100%			

				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	25			
						2500%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp29.844.000	Rp29.770.000			
						100%			
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	23,08	28,85			
						125%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp69.151.500	Rp61.406.654			
						1000%			
				Keg : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	125			
						125%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp69.151.500	Rp69.140.654			
						99,98%			
				Sub Kegiatan :					
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20	25			
						125%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp69.151.500	Rp69.140.654			
						99,98%			

				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33,33 Alokasi Anggaran : Rp24.640.000	25 75 Realisasi Anggaran: Rp23.993.830 97%			
				Keg : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Alokasi Anggaran : Rp24.640.000	11,25 75% Realisasi Anggaran: Rp23.993.830 97%			
				Sub Kegiatan :					
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 Alokasi Anggaran : Rp24.640.000	15 75% Realisasi Anggaran: Rp23.993.830 97%			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Alokasi Anggaran : Rp15.000.000	100 100% Realisasi Anggaran: Rp14.900.000 99%			
				Keg : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 Alokasi Anggaran : Rp15.000.000	21 1050% Realisasi Anggaran: Rp14.900.000 99%			

				Sub Kegiatan :					
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20	15			
					Alokasi Anggaran : Rp5.000.000	Realisasi Anggaran: Rp4.900.000 96%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	2	19			
						950%			
					Alokasi Anggaran : Rp10.000.000	Realisasi Anggaran: Rp10.000.000 100%			
				Program Pengelolaan Persampahan	1,30	0,73			
						56,15%			
					Alokasi Anggaran : Rp6.125.111.076	Realisasi Anggaran: Rp5.663.513.636 92%			
				Keg : Pengelolaan Sampah	14,23	8			
						56%			
					Alokasi Anggaran : Rp6.125.111.076	Realisasi Anggaran: Rp5.663.513.636 92%			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	1			
						100%			

					Alokasi Anggaran : Rp18.976.000	Realisasi Anggaran: Rp18.106.000 95%			
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	3 300%			
					Alokasi Anggaran : Rp299.099.600	Realisasi Anggaran: Rp287.809.600 96%			
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	6000	1244 21%			
					Alokasi Anggaran : Rp294.981.800	Realisasi Anggaran: Rp293.905.400 100%			
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3	3 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp36.750.000	Realisasi Anggaran: Rp24.770.000 67%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1	1 100%			
					Alokasi Anggaran : Rp32.597.400	Realisasi Anggaran: Rp30.493.400			
						94%			

				Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	3	5			
						167%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp29.700.000	Rp22.437.100			
						76%			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	14	25			
						179%			
					Alokasi Anggaran :	Realisasi Anggaran:			
					Rp5.413.006.276	Rp4.994.302.736			
						92,26%			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2022, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 06. Capaian Kinerja IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Lingkungan Hidup					
	Dinas Lingkungan Hidup					
	1. Indeks Kualitas Air(IKA)	Angka	52,00	55,56	106,85	Sangat Baik
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,39	88,73	103,91	Sangat Baik
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	42,57	37,29	87,60	Baik

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Air adalah 106,85% (Sangat Baik) dan Indikator Indeks Kualitas Udara adalah 103,91% (Sangat Baik). Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Hal ini
2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Tutupan Lahan (IKTL) adalah 41,84 (Kurang), hal ini disebabkan karena masih memerlukan data inventarisasi RTH, Penambahan RTH dan Penetapan RTH (SK Bupati). Selain itu, Sumber data tutupan lahan yang digunakan sebelumnya adalah data BIG yang kemudian diubah menjadi data hasil validasi dari Direktorat Standarisasi Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan DLHK sehingga capaian kinerja pada indikator indeks Tutupan Lahan tidak mencapai target.

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasinya. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup semakin baik apabila realisasinya semakin tinggi dan akan tidak baik pencapaian kinerjanya apabila semakin rendah realisasinya. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 07. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada DLH Tahun 2022

No	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Lingkungan Hidup					
	Dinas Lingkungan Hidup					
	1. Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	%	12,50	11,25	90	
	2. Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,59	1,76	67,95	
	3. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	1,38	1,24	89,86	
	4. Persentase Lembaga/Perusahaan Penghasil Limbah B3 yang diawasi (%)	%	100	100	100	
	5. Persentase Keatatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	%	64	60	93,75	
	6. Persentase MHA, Kearifan Lokal yang Terkait PPLH yang diakui keberadaannya	%	1,14	1,43	125,44	
	7. Persentase Lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	23,08	28,85	125	
	8. Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	%	33,33	25	75	
	9. Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	100	100	100	
	10. Persentase Pengelolaan Sampah yang Bernilai Ekonomi	%	1,30	2,38	172,46	

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berikut hasil Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022:

Tabel 08. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Lingkungan Hidup								
	Dinas Lingkungan Hidup	19.711.383.761	18.912.931.984	798.451.777	95,95	11	105,02%	21	112,88%

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

2.1.5 Inovasi

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai permasalahannya dapat diurai dengan berbagai inovasi. Inovasi dapat berupa menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dengan berdasarkan pada pemikiran dan tujuan untuk Peningkatan Pemberian Pelayanan Publik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup 2022

Tabel 09. Inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KET.
1.	TANGKASA	a. Mengurangi timbunan sampah di tempat-tempat wisata yang berbasis 3R	a. Berkurangnya timbunan sampah ditempat-tempat wisata	
2.	Eco Pertashop	a) Terwujudnya lembaga penyalur Bahan Bakar Resmi berskala kecil sesuai standar ECO Perthashop b) Meningkatnya Ketaatan pelaku usaha ECO Perthashop	a. Meminimalisir dampak pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan Pertashop b. Kestabilan Harga BBM dapat diatasi	
3.	Kampung Ekonomi Hijau	a. Terwujudnya Kampung Ekonomi Hijau melalui pendampingan pelaku usaha rumah tangga	a. Dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan taman b. Mendorong Keterlibatan pelaku usaha dalam	Program Kampung Ekonomi Hijau merupakan salah satu solusi dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Dengan kegiatan ramah lingkungan dapat memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya alam yang ada. Masyarakat dapat

			pengelolaan kegiatan yang berbasis ramah lingkungan c. Memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait	mengambil peran dalam memantau, mengawasi dan melestarikan lingkungan. Dengan Program Kampung Iklim diharapkan masyarakat dapat menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara ekologi.
--	--	--	---	---

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

2.1.5. Prestasi/Penghargaan

Tabel 10. Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan Oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Strategis yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang diambil dalam satu tahun anggaran dituangkan ke dalam sebuah laporan. Laporan tentang kebijakan yang diambil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1.	Mengembangkan Iptek ramah lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	21 Tahun 2021 4 Januari 2021	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan : 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan 2. Mendukung tugas-tugas pemerintah daerah terutama penyediaan data kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup Masalah yang diselesaikan : 1. Tersedianya Data akurat uji kualitas lingkungan hidup	PERBUP

				2. Memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, pengawasan dan penyusunan program dibidang lingkungan hidup.	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

(NIHIL)

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

(NIHIL)

3.2 Hambatan-Hambatan

(NIHIL)

BAB VI

PENUTUP

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja yang dilakukan dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini, pada pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup serta pihak terkait lainnya. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Benteng, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Selayar,



MUH. TAUFIK KADIR, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19720303 200604 1 020

